

**PENGARUH PENDUDUK MISKIN, PAJAK DAERAH, PENGELUARAN
PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SERTA TOTAL
BELANJA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

(Periode Tahun 2010-2014)

JURNAL



Oleh:

Nama : Wenny Widiyanti

Nomor Mahasiswa : 15313072

Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

2016

Pengesahan

Pengaruh Penduduk Miskin, Pajak Daerah, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Total Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah (Periode Tahun 2010-2014)

Nama : Wenny Widiyanti

Nomor Mahasiswa : 15313072

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 6 Oktober 2016
Telah disetujui dan disahkan oleh,
Dosen Pembimbing



(Jaka Sriyana, Dr.,SE.,M.Si.)

**PENGARUH PENDUDUK MISKIN, PAJAK DAERAH, PENGELUARAN
PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SERTA TOTAL
BELANJA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI
SULAWESI TENGAH
(Periode Tahun 2010-2014)**

**Wenny Widiyanti
Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia**

Abstrak

Paper ini memodelkan perilaku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Variabel-variabel Independen yang digunakan adalah Penduduk Miskin, Pajak Daerah, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Total Belanja, variable Dependennya IPM. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan 11 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan menggunakan metode Data Panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Penduduk Miskin berpengaruh negatif dan signifikan, Pajak Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan, Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan, Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan serta Total Belanja berpengaruh positif dan signifikan.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penduduk Miskin, Pajak Daerah, Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan dan Kesehatan, Total Belanja

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu langkah dalam membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada atau membuat suatu perubahan yaitu membuat sesuatu menjadi lebih baik atau meningkat. Pembangunan nasional yang berlandaskan pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah maka membutuhkan pembangunan. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses untuk melakukan perubahan pada indikator sosial maupun ekonomi masyarakat menuju ke arah yang lebih baik dan berkesinambungan (Mudrajad, 2006 dan Todaro, 2009).

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. IPM merupakan suatu

indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk.

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Indeks Pembangunan Manusia

Definisi Pembangunan Manusia menurut UNDP (*United Nation Development Program*) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka penduduk menjadi tujuan akhir dari pembangunan, sedangkan upaya pembangunan merupakan sarana (*principal means*) untuk tujuan tersebut. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi.

Secara umum metode penghitungan IPM yang digunakan di Indonesia sama dengan metode penghitungan yang digunakan oleh UNDP. IPM di Indonesia disusun berdasarkan tiga indikator komponen indeks, yaitu:

- 1) Indeks angka harapan hidup ketika lahir

- 2) Indeks pendidikan, yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah (rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani) dan angka melek huruf Latin atau lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih)

- 3) Indeks standar hidup layak, yang diukur dengan pengeluaran per kapita (PPP-Purchasing Power Parity/paritas daya beli dalam rupiah).

Kemiskinan

Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan menurut PBB didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain.

Pajak Daerah

Menurut UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapat lainnya, Simanjuntak (2003) menyatakan bahwa pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh daerah-daerah seperti propinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya masing-masing.

Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat diklasifikasikan dalam dua kategori utama yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan kebutuhan pokok. Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah meliputi pendidikan dasar dan kesehatan. pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam lingkaran setan kemiskinan. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah melalui perbaikan kualitas pendidikan. Pelayanan pendidikan masyarakat yang paling elementer adalah pendidikan dasar, yang oleh pemerintah diterjemahkan dalam program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Pemerintah hendak menjamin bahwa semua anak dapat bersekolah, sehingga diperlukan alokasi anggaran pendidikan yang besar. Dalam pemenuhan anggaran tersebut amanat amandemen UUD 1945 telah mensyaratkan alokasi anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total anggaran (Syahril, 2010). Pendidikan merupakan sektor yang fundamental bagi sebuah negara karena pendidikan mampu memberikan manfaat positif bagi pembangunan. Pendidikan memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan produktivitas, sehingga pendidikan diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Anggaran pendidikan yang besar jika dikelola dengan baik dan dialokasikan secara tepat diharapkan mampu meningkatkan tingkat melek huruf dan tingkat lama sekolah sehingga pada gilirannya akan meningkatkan IPM.

Sama halnya dengan pendidikan, Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya

merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*welfare society*). Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Sementara itu, tingkat kemiskinan akan terkait dengan tingkat kesejahteraan. Oleh karena kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat (*right for health*) dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas (Syahril, 2010).

Dalam UUD 1945 disebutkan kesehatan merupakan hak dasar (azasi) manusia, sehingga pemerintah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan perlindungan dan fasilitasi kesehatan kepada rakyatnya. Apalagi dalam tujuan pembangunan nasional telah disebutkan setiap penduduk berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Maka wajar jika kesehatan dapat disebut sebagai investasi pemerintah pada belanja/pegeluaran pembangunan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Prioritas kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Lains dan Pasay yang lebih menekankan aspek pendidikan dalam pembangunan manusia, Tjiptoherijanto (1989) melihat mutu manusia dari sisi lain yaitu dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. Oleh karena itu, diperlukan anggaran khusus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pengeluaran pemerintah.

Total Belanja Daerah

Komponen dari APBD adalah Belanja Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang

wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (Darise, 2007). Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode Data Panel, Ada 3 model yang dapat digunakan untuk menafsirkan data panel yaitu:

- 1) *Pooled Least Square* (PLS) atau metode *Common Effect*
- 2) *Fixed Effect Model* (FEM)
- 3) *Random Effect Model* (REM) , (Baltagi, 2005).

Pooled Least Square (PLS) Atau Metode Common Effect

Model pertama menggunakan data yang digabung kemudian diestimasi adalah merupakan penggunaan metode *Pooled Least Squares* (PLS) atau metode *Common Effect*. Koefisiennya menggambarkan dampak variabel independen. Terhadap variabel dependen konstan untuk setiap cross section dan time series. Artinya metode ini tidak memperhitungkan „nature“ dari perubahan yang terjadi di setiap *cross section* dan *time series* sehingga kompleksitas kenyataan sebenarnya tidak dapat dicerminkan dalam metode ini.

Fixed Effect Model (FEM)

Metode ini memiliki beberapa kemungkinan asumsi yang bisa digunakan peneliti berdasarkan kepercayaannya dalam memilih data, seperti:

- a) Intersep dan koefisien slope konstan dari setiap *cross section* di sepanjang waktu. Error term diasumsikan mampu mengatasi perubahan sepanjang waktu dan individu. Asumsi ini mengikuti asumsi dalam metode OLS.
- b) Koefisien slope konstan namun intersepnya bervariasi di setiap *cross section*.
- c) Seluruh koefisien baik slope maupun intersep bervariasi setiap individu.

Model ini memasukan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai *intersep* antar unit *cross section*. Pendekatan dengan memasukan variabel boneka ini dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*).

Random Effect Model

Widarjono (2013) menjelaskan bahwa dimasukkannya variabel dummy di dalam model *fixed effect* bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun, ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (*error term*) dikenal sebagai metode *random effect*.

Uji Signifikansi Common Effect atau Fixed Effect

Uji F kita gunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan *Fixed Effect* lebih baik dari model regresi *common effect*.

$$F = \frac{SSR_R - \frac{SSR_U}{q}}{\frac{SSR_U}{n - k}}$$

SSR_R dan SSR_U *sum of Squared residuals* metode *common effect* dan teknik *fixed effect*. q adalah jumlah restriksi metode *common effect* dan n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah parameter estimasi metode *fixed effect*.

Uji LM Test

LM Test adalah pengujian untuk memilih model PLS atau model *random effect*. Dalam pengujian ini dilakukan hipotesa sebagai berikut :

H_0 : Model PLS (*Restricted*)

H_1 : Model *Random effect* (*Unrestricted*)

Formulasi untuk menguji hipotesa diatas dengan menggunakan tabel distribusi *chi_squares* seperti yang dirumuskan oleh Breusch Pagan :

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left(\frac{\sum_{i=1}^n (\sum_{t=1}^T \hat{e}_{it})^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T \hat{e}_{it}^2} - 1 \right)^2$$
$$= \frac{nT}{2(T-1)} \left(\frac{\sum_{i=1}^n (T \bar{\hat{e}}_{it})^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T \hat{e}_{it}^2} - 1 \right)^2$$

n = jumlah individu; T = jumlah periode waktu dan e adalah residual metode OLS.

Jika nilai LM Test (2Stat) hasil pengujian lebih besar dari χ^2 Tabel, maka hipotesa nol ditolak sehingga model yang kita gunakan adalah model *random effect* dan sebaliknya.

Uji Hausman Test

Uji hausman digunakan untuk memilih model *fixed effect* atau *random effect*. Gujarati (2012) menerangkan hipotesis nol yang mendasari uji Hausman adalah bahwa estimator-estimator *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* tidak memiliki perbedaan yang besar. Uji statistik yang dikembangkan oleh *Hausman* memiliki distribusi χ^2 asimtotis. Jika hipotesis nol ditolak maka kesimpulannya adalah *Random*

Effect Model tidak tepat karena *random-effects* kemungkinan berkorelasi dengan satu atau lebih variabel independen. Dalam hal ini, *Fixed Effect Model* lebih baik daripada *Random Effect Model*.

Pengujian Statistik

Selain uji asumsi klasik, juga dilakukan uji statistik yang dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Uji statistik dilakukan dengan koefisien determinasinya (R^2), pengujian koefisien regresi secara serentak (Uji F), dan pengujian koefisien regresi secara individual (Uji T).

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar presentase variasi dalam variabel terikat pada model yang diterangkan oleh variabel bebasnya. Nilai R^2 berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Semakin besar R^2 , semakin baik kualitas model, karena semakin dapat menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen (Gujarati, 2003).

Uji F

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel tak bebas. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut :

$H_0: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 = 0$ (tidak ada pengaruh)

$H_a: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \neq 0$ (ada pengaruh)

Dengan demikian keputusan yang diambil adalah :

- Terima H_0 jika F statistik < nilai F tabel, artinya suatu variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel tak bebas.
- Terima H_a jika nilai F statistik > nilai F tabel, artinya nilai suatu variabel bebas merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel tak bebas.

Uji T

Uji t statistik dilakukan untuk menguji pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual dan menganggap variabel bebas yang lain konstan. Hipotesis nol yang digunakan adalah :

$H_0: \beta_0 = 0$

Artinya apakah variabel independen bukan merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Dan hipotesis alternatifnya adalah :

$H_a: \beta_1 \neq 0$

Artinya apakah variabel independen merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Signifikansi pengaruh tersebut dapat diestimasi dengan membandingkan antara nilai t tabel dengan nilai t hitung, jika nilai t hitung > t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai t hitung < t tabel maka H_0 ditolak, yang berarti variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.

Persamaan Estimasi dengan Intersep Pembeda *Cross Effect*

Persamaan estimasi dengan mempertimbangkan *cross effect* dapat dilakukan dengan melakukan penjumlahan antara konstanta pada persamaan hasil estimasi dengan hasil estimasi koefisien *cross effect* (Sriyana, 2014).

Persamaan Estimasi dengan Intersep Pembeda *Period Effect*

Persamaan estimasi *period effect* dihasilkan dengan menjumlahkan konstanta pada persamaan hasil estimasi dengan hasil estimasi koefisien masing-masing periode dari koefisien *period effect*.

HASIL DAN ANALISIS

Berikut merupakan hasil regresi data panel dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu *Pooled Least Square* atau metode *Common*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*.

Estimasi *Pooled Least Square* atau *Common Effect*

Dari hasil pengolahan regresi data panel diatas diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R-squared) dari hasil estimasi sebesar 0.697331, yang menunjukkan variabel-variabel independent mampu menjelaskan 69,7331% terhadap variabel dependent, sedangkan sisanya dijelaskan diluar model.

Estimasi *Fixed Effect Model*

Dari hasil pengolahan regresi data panel dengan metode *Fixed Effect Model* diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R-squared) dari hasil estimasi sebesar 0.991878, yang menunjukkan variabel-variabel independent mampu menjelaskan 99,1878% terhadap variabel dependent. Hasil estimasi diatas menunjukkan adanya pengaruh individu dari data *cross section* (kabupaten/kota) pada konstanta model penelitian.

Estimasi *Random Effect Model*

Dari hasil pengolahan regresi data panel dengan metode *Random Effect Model* diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R-squared) dari hasil estimasi sebesar 0.667667, yang menunjukkan variabel-variabel independent mampu menjelaskan 66,7667% terhadap variabel dependent. Hasil estimasi diatas menunjukkan adanya pengaruh individu dari data *cross section* (kabupaten/kota) pada konstanta model penelitian.

Pemilihan Model

Uji Signifikansi *Fixed Effect* (Uji Chow)

Tabel 4.9 Hasil Pengujian *Likelihood Ratio Test* (uji chow)

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: FIXED			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	141.442349	(10,39)	0.0000
Cross-section Chi-square	198.996349	10	0.0000

Berdasarkan hasil pengujian di atas diperoleh angka probabilitas Cross-section F sebesar 0,0000 dengan demikian maka diketahui bahwa nilai p-value lebih kecil dari α (0,05), sehingga kesimpulan dari hasil uji *Chow* adalah menolak H_0 , sehingga model *Fixed Effect Model* lebih baik untuk digunakan daripada *Pooled Least Square (common effect)*.

Uji *Hausman Test*

Tabel 4.10

Hasil Pengujian *Hausman Test*

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: RANDOM			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	49.380675	5	0.0000

Berdasarkan hasil pengujian di atas diperoleh nilai *chi-square statistic* sebesar 49.380675. Dengan membandingkan nilai *chi-square statistic* tersebut dengan nilai *chi-square* kritis ($\alpha = 0,05$) yaitu 11.07, maka disimpulkan bahwa hasil pengujian menolak H_0 karena nilai *chi-square statistic* lebih besar daripada *chi-square* kritis. Sehingga dari kesimpulan tersebut maka pendekatan yang lebih baik digunakan ialah *Fixed Effect Model (REM)*.

Analisis Hasil Regresi

Berdasarkan pemilihan model yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman, model analisis yang paling tepat dan paling baik yang digunakan adalah *Fixed effect Model*.

Tabel 4.11

Estimasi Output Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: IPM				
Method: Panel Least Squares				
Date: 10/01/16 Time: 21:10				
Sample: 2010 2014				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 11				
Total panel (balanced) observations: 55				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	75.76410	2.732974	27.72221	0.0000
KEMISKINAN	-0.000350	5.80E-05	-6.042645	0.0000
PAJAK	-0.0000367	2.43E-05	-1.507287	0.1398
PENDIDIKAN	0.0000576	3.41E-07	1.686125	0.0998
KESEHATAN	-0.0000189	6.05E-06	-3.118483	0.0034
BELANJA	0.0000492	1.33E-06	3.709755	0.0006
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.991878	Mean dependent var	64.24255	
Adjusted R-squared	0.988755	S.D. dependent var	5.194517	
S.E. of regression	0.550846	Akaike info criterion	1.883323	
Sum squared resid	11.83381	Schwarz criterion	2.467274	
Log likelihood	-35.79138	Hannan-Quinn criter.	2.109142	
F-statistic	317.5348	Durbin-Watson stat	1.923860	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Uji F (Uji Serempak)

Hasil pengujian dengan menggunakan model regresi *Fixed Effect Model* menunjukkan nilai F-statistik sebesar 317.5348 dan nilai probabilitas (F-statistik) sebesar 0,000000. Dengan membandingkan nilai F-statistik tersebut dengan nilai F-tabel sebesar 2.59 ($\alpha=1\%$) maka diketahui bahwa F-statistik > F-tabel sehingga disimpulkan bahwa semua *regressor* (variabel independen) secara bersama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Koefisien Reterminasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan suatu ukuran yang menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang diestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekat garis regresi yang telah diestimasi dengan data sesungguhnya. Hasil pengujian dengan menggunakan model regresi *Fixed Effect Model* menghasilkan nilai R^2 sebesar 0.991878 yang berarti bahwa sebanyak 99,18 persen variasi atau perubahan pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen dalam model, sedangkan sisanya (0,82 persen) dijelaskan oleh sebab lain di luar model yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Statistika t

Hasil pengujian regresi data panel dengan metode *Fixed Effect Model* menunjukkan bahwa nilai t-statistik variabel Penduduk Miskin sebesar 6.042645. nilai t-tabel diperoleh angka 1.679 sehingga nilai t-statistik > t-tabel, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Penduduk Miskin secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel IPM. Nilai t-statistik variabel Pajak Daerah sebesar 1.507287. Nilai t-tabel dengan $\alpha= 5$ persen diperoleh angka 1.679 sehingga nilai t-statistik < t-tabel, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel IPM. Nilai t-statistik variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan sebesar 1.686125. Nilai t-tabel dengan $\alpha= 5$ persen diperoleh angka 1.679 sehingga nilai t-statistik > t-tabel, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan secara individu memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel IPM. Nilai t-statistik variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan sebesar 3.118483. Nilai t-tabel dengan $\alpha= 5$ persen diperoleh angka 1.679 sehingga nilai t-statistik > t-tabel, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan secara individu memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel IPM. Nilai t-statistik variabel Total Belanja sebesar 3.709755. Nilai t-tabel dengan $\alpha=5$ persen diperoleh angka 1.679 sehingga nilai t-statistik > t-tabel, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Total Belanja secara individu memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel IPM. Berikut akan diuraikan hasil pengujian atas kelima hipotesis yang telah dirumuskan.

Analisis Pengaruh Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah Penduduk Miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah dengan probabilitas sebesar 0.00000. Variabel Penduduk Miskin memiliki koefisien sebesar -0.000350. Artinya jika setiap penambahan 1 persen jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah maka tingkat Indeks Pembangunan Manusia akan menurun. Hasil ini sesuai dengan penelitian Maryani (2014) yang menyatakan bahwa Penduduk Miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, meskipun begitu pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan masih berpengaruh kecil terhadap IPM, hal ini menandakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk bidang tersebut belum optimal baik dari penggunaannya dan alokasinya.

Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah dengan probabilitas sebesar 0.1398. Variabel Pajak Daerah memiliki koefisien sebesar -0.0000367. Dengan begitu dikatakan Pajak Daerah tidak berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Setiawan & Abdul (2013) yang menyatakan bahwa Pajak Pendapatan (PPN) berpengaruh terhadap IPM dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah dengan probabilitas sebesar 0.0988. Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan memiliki koefisien sebesar 0.000000567. Hasil ini sesuai dengan penelitian Usmaliadanti (2011) dengan perolehan hasil adalah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah dengan probabilitas sebesar 0.0034. Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan memiliki koefisien sebesar -0.0000189. Artinya jika setiap penurunan 1 persen Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah maka tingkat Indeks Pembangunan Manusia akan menurun. Hasil ini sesuai dengan penelitian Astri, et al (2013) dengan perolehan hasil adalah Pengeluaran pemerintah daerah pada sektor Kesehatan tidak berpengaruh pada IPM.

Analisis Pengaruh Total Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah Total Belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah dengan probabilitas sebesar 0.0006. Variabel Total Belanja memiliki koefisien sebesar 0.00000492. Artinya jika setiap penambahan 1 persen Total Belanja di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah maka tingkat Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat. Hasil ini sesuai dengan penelitian Hidayahwati (2011) dengan perolehan hasil adalah Total Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian terhadap hipotesis yang disusun sebagaimana telah dibahas dalam Bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Penduduk Miskin secara individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Ini berarti bahwa ketika Penduduk Miskin meningkat maka akan berpengaruh terhadap penurunan nilai IPM Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, demikian pula sebaliknya.*
2. *Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini diduga disebabkan karena banyaknya hambatan yang di hadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya pencapaian realisasi pajak daerah diantaranya adalah*

pelayanan yang kurang memadai terhadap wajib pajak. Selain itu, masih banyak masyarakat yang tidak taat dalam membayar pajak namun tidak ada sanksi yang tegas. Sehingga dana pajak dari masyarakat yang harusnya masuk guna pengalokasian pelaksanaan pembangunan menjadi terhambat.

3. *Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan secara individu berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.* Hal ini diduga karena langkah-langkah yang di ambil oleh pemerintah guna pendidikan masih belum terealisasi dengan seutuhnya dalam pendidikan seperti kurangnya akses terhadap masyarakat untuk bias menikmati pendidikan, ketidakmerataan dalam akses dana pendidikan seperti ketidakmerataan dana di desa dan kota serta jender, masih kurangnya sarana dan prasarana guna menunjang pendidikan terutama di daerah-daerah terpencil, serta dalam penyerapan dana banyak pihak-pihak yang memanipulasi dana yang seharusnya di alokasikan bagi pendidikan untuk kepentingan sendiri.
4. *Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.* Ini berarti bahwa ketika Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan meningkat maka akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai IPM Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, demikian pula sebaliknya.
5. *Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Total Belanja secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.* Ini berarti bahwa ketika Total Belanja meningkat maka akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai IPM Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, demikian pula sebaliknya.

Saran

Pemerintah Daerah sebaiknya menjalankan program terpadu secara serius dan bertanggung jawab serta membuat kebijakan yang lebih lagi agar dapat segera mengatasi masalah kemiskinan. Sehubungan dengan permasalahan pajak, jika pemerintah setiap tahun tetap mengupayakan peningkatan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah maka pemerintah harus menggerakkan pertumbuhan perekonomian rakyat terlebih dahulu, pembangunan harus diarahkan pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat termasuk penyediaan fasilitas umum dan pemberian pelayanan secara memadai. Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan mengalokasikan belanja yang lebih tinggi untuk kepentingan kesehatan, pendidikan, dan perbaikan kondisi perekonomian masyarakat.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i (2011), "Bank Syariah Dari Teori ke Praktik", Gema Insani, Jakarta.
- Ardiansyah (2010), "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara", Universitas Sumatra Utara, Fakultas Ekonomi, Medan.
- Baltagi, Badi H. (2005), "Econometric Analysis of Panel Data", Edisi 3, Wiley.
- BPS-Statistic Indonesia, UNDP, BAPPENAS (2004), "National Human Development Report 200, The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia.
- Christina, Usmaliadanti (2011), "Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2009", Universitas Diponegoro, Semarang.
- Darise, Nurlan (2007), "Pengelolaan Keuangan Daerah", Indeks, Jakarta.
- Emil, Salim (1996), "Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris", Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ginting, Paham dan Syafrizal Helmi Situmorang (2008), "Filsafat Ilmu dan Metode Riset", USU Press, Medan.
- Gujarati, Damodar N Dan Dawn C. Porter (2013), "Dasar-Dasar Ekonometrika", Buku 1: Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta.
- Gujarati, Damodar N Dan Dawn C. Porter (2012), "Dasar-Dasar Ekonometrika" Buku 2: Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta.
- Guritno, Mangkoesobroto, DR.Mec (1993), "Ekonomi Publik", Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta.
- Guritno, Mangkoesobroto (2001), "Ekonomi Publik", Edisi-III, BPFE, Yogyakarta.

- Hidayahwati (2011) “Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur”, Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Kuncoro, Mudrajad (2006), “Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif”, Erlangga, Jakarta.
- Lanjouw Petter, dkk. (2001) “Poverty Education and health in Indonesia : Who Benefits From Public Spending”, World Bank Discussion Paper No.339, Washington.
- Mirza, Denni Sulistio (2012) “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009”, Economics Development Analysis Journal. EDAJ 1 (1), ISSN 2252-6560. Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Mochammad, Yuli Arifin (2015), “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006-2013”, Universitas Jember (UNEJ).
- Mudrajad, Kuncoro (1997), “Ekonomi Pembangunan, Teori, masalah dan kebijakan”, Cetakan pertama, Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Muhammad Bhakti Setiawan, Abdul Hakim (2013), “INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA”, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Musgrave, Richard A dan Peggy B. Musgrave (1993), “Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek”, Erlangga, Jakarta.
- Ramadhanera Puteri, Madya (2009), “*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (Pendidikan dan Kesehatan) Terhadap Pembangunan Manusia Dalam Konteks Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat*”, Other thesis, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Sadono, Sukirno (2001) “Pengantar Teori Mikroekonomi”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Simanjuntak, Payaman J (2003), “Produktivitas Kerja Pengertian dan Ruang Lingkupnya”, Prisma, Jakarta.

Soegijoko, Budhy Tjahjati et al. (2001), “Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia”. PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta.

Sriyana, Jaka Dr. (2014), “Metode Regresi Data Panel”. Edisi ke-1 cetakan pertama, EKONISIA, Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Syahril, (2014) “Analisis Pengaruh Anggaran Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia”, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Tjiptoherijanto, Prijono (1989), “Untaian Pembangunan Sumberdaya Manusia”, FEUI, Jakarta.

Tri Maryani, (2014) “Analisis Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah”, UPN “V” YOGYAKARTA, Fakultas Ekonomi, Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta.

Todaro, et al (2006), “Pembangunan Ekonomi”, Edisi ke 9, Erlangga, Jakarta.

Widarjono, Agus (2013) “Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya : Disertai Panduan Eviews”, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Ul Haq, Mahbub. “Human Development Report: The Human Development Concept”.

www.bps.go.id , www.bpssulteng.go.id

[www.bappenas.go .id](http://www.bappenas.go.id)

www.bi.co.id, Pengeluaran Pemerintah

www.jabar.bps.go.id, Indeks Pembangunan Manusia.

www.susenas.com

www.undp.com, Human Deveploment Index.

www.worldbank.org

<http://kpu-sultengprov.go.id/arsip/922> , ,

http://sulteng.bps.go.id/endback/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Sulawesi-Tengah-2016.pdf